

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia informasi semakin hari semakin pesat. Penyerapan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di era yang semakin kompleks. Informasi menjadi suatu kebutuhan penting yang mendasari seluruh gerak aktivitas, terlebih yang memiliki tingkat intensitas dan mobilitas yang tinggi. Berbagai media, baik cetak maupun elektronik seakan berlomba menyuguhkan ragam informasi dari berbagai sisi, yang jika dilihat lebih dalam ada yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Kompetisi yang semakin ketat menyebabkan setiap penyedia informasi media cetak dan elektronik membuat langkah baru untuk memikat masyarakat. Misalnya dalam media elektronik, banyaknya tayangan kekerasan dari film-film Hollywood yang dipertontonkan kepada anak-anak pada jam-jam tayang yang seharusnya tidak dikonsumsi untuk anak-anak, banyaknya sinetron di televisi swasta yang menayangkan gaya hidup mewah maupun tutur kata yang sebenarnya tidak sopan. Kompetisi media dan keberagaman informasi melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok seiring perkembangan zaman, dan ini akan mempengaruhi kualitas

Sumber Daya Manusia Indonesia sendiri, terutama anak yang harus diarahkan sejak dini dalam upaya penyerapan informasi yang sesuai.

Hak anak memperoleh informasi juga perlu untuk mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109). Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹. Hak anak haruslah dijamin dalam keadaan apapun, termasuk dalam hak untuk memperoleh informasi yang benar melalui berbagai media. Upaya perlindungan anak harus diupayakan sedini mungkin dan peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan pembinaan dan pengembangan perlindungan anak.

Norma hukum yang ada juga mengatur tentang hak atas informasi yang benar yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diambil dari www.ri.go.id.

Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) juga memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan atas informasi berdasarkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu atau orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu atau orang lain. Dalam hal ini kebebasan yang dimaksud harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia². Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor disebutkan juga pada Pasal 36 ayat (3) bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan pada waktu yang tepat, dan wajib mencatumkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. Pada ayat (5) Huruf b, disebutkan isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28F.

penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109) juga mengatur dalam Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 56 ayat (1) Huruf c, berbunyi Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak agar bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Selanjutnya dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diatur juga mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang pada Pasal 4 Huruf f, berbunyi Lembaga Penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan. Dituangkan juga dalam Pasal 8 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) bahwa lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan berbagai program dan isi siaran wajib memperhatikan kepentingan anak, remaja dan perempuan. Hal yang sama mengenai perlindungan terhadap anak, remaja dan perempuan juga diatur dalam Standar Program Siaran (SPS), Pasal 5 Huruf f, Pasal 6 Huruf c.

Hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio ini juga sangat terkait dengan muatan dan isi informasi baik berupa bahasa, kata ataupun kalimat yang disuguhkan, agar tidak merusak dan memberikan efek negatif pada proses tumbuh kembang anak. Erat hubungannya dengan informasi yang diberikan, Standar Program Siaran mengatur hal tersebut pada

Pasal 13, yakni bahwa Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang berkonotasi menghina, jorok atau mesum atau vulgar. Berkaitan pula dengan judul penulisan ilmiah ini yang mengangkat media Radio sebagai penyedia informasi dan hak anak sebagai penerima informasi, juga dituangkan dalam Pasal 23 Standar Program Siaran, pembawa acara juga bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum dan menceritakan tentang seks secara eksplisit dan rinci.

Faktanya bahwa permasalahan siaran radio sebagai penyedia layanan informasi kepada masyarakat yang berdampak pada pendengar yang rata-rata usianya masih tergolong anak-anak di Jogjakarta khususnya. Yang dari hari ke hari dirasakan perlu mendapat tanggapan dan perhatian serius dari kalangan pemerhati radio, masyarakat yang peduli akan perkembangan generasi muda, dan Pemerintah bersama Komisi Penyiaran Indonesia. Bisnis dunia radio di Jogjakarta sudah menjamur di berbagai tempat baik yang bersifat radio komunitas , radio swasta maupun radio nasional milik Pemerintah yang seharusnya mendapat pengawasan khusus, mengingat kota Jogjakarta berpredikat sebagai kota pendidikan dan budaya yang seharusnya dapat dipertahankan oleh siaran radio tersebut sebagai bentuk kekhasan seni budaya dan tetap mempertahankan budaya Jogjakarta ditelinga pendengar-pendengarnya.

Radio siaran adalah saluran bagi kebebasan informasi, pertukaran gagasan, pertukaran opini, hiburan, pendidikan dan periklanan bagi

masyarakat³. Dalam melaksanakan peran tersebut, radio siaran mengutamakan kepentingan umum atas dasar nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Negara, nilai demokrasi, nilai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan budaya masyarakat, serta hukum yang berlaku⁴. Dalam Standar Profesional Radio Siaran, Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) bagian V.c perihal Kesopanan dan Kesusilaan disebutkan bahwa :⁵

1. Lelucon yang tidak sesuai dengan selera yang baik atau nilai-nilai kesopanan harus dihindari. Merupakan suatu hal tidak baik bila lelucon didasarkan pada karakteristik tertentu seperti ras, gender dan cacat fisik.
2. Dialog atau kata yang cabul, menghina, kotor dan vulgar tidak diperkenankan untuk disiarkan.
3. Stasiun radio harus memperhatikan hukum yang berlaku tentang kesopanan dan kesusilaan.

Tapi disisi lain , faktanya masih banyak stasiun radio yang melanggar hal tersebut, khususnya kekerasan oral atau kata-kata. Misalnya ada penyiar radio yang dalam siarannya menggunakan kata-kata cabul, jorok atau sedikit vulgar dan berbau seks. Dan hal ini dikaitkan dengan pendengar anak-anak yang belum berusia 18 tahun keatas. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mendalamainya. Sudah selayaknya komunikasi massa, seperti radio

³ Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI, *Standar Profesional Radio Siaran*, diterbitkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Bekerja sama dengan Penerbit Nuansa, Bandung. hlm.7.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.hlm.18-19.

memberikan porsi besar dalam membentuk watak dan karakter generasi muda melalui acara siaran yang mendidik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada radio yang tidak menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam siarannya terutama dalam penggunaan kekerasan “ kata-kata “ yang berkonotasi tidak baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk :

1. Mengetahui dan memperoleh data tentang hak-hak anak untuk memperoleh informasi yang benar melalui siaran radio.
2. Mengetahui dan memperoleh data tentang sanksi yang diberikan kepada radio yang tidak menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam siarannya, terutama dalam penggunaan dan pelanggaran terhadap kekerasan “kata-kata” yang berkonotasi tidak baik

D. Keaslian Penelitian

Objek yang diteliti oleh peneliti berbeda dengan peneliti yang lain dan mempunyai kekhususan, sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Walaupun pernah ada tulisan sejenis yang dibuat, tetapi tujuan penelitian dari tulisan ini, berbeda dari tujuan penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian yang sudah ada yakni berjudul “ *Perlindungan Konsumen Jasa Penyiaran Radio Terhadap Hak Atas Informasi* ” ditulis oleh Maria Lusiana Irawati. Dengan tujuan mengetahui dan memperoleh data tentang pelaksanaan hak atas informasi dalam menawarkan jasa siarannya pada Radio RRI Kupang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa radio. Namun kekhususan dari penelitian yang dilakukan penulis lebih cenderung meneliti hak atas informasi melalui siaran radio dalam artian penulis melihat permasalahan tersebut dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak anak.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti membedakan menjadi dua, yaitu :

1. Secara Teoritis :

- a. Memperluas referensi bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai hak-hak anak yang harus dijamin dan dilindungi terkait atas informasi yang benar dan sesuai dengan usia.
- b. Sumbangan pemikiran bagi para orang tua agar lebih memperhatikan dan mengetahui hak-hak dasar yang dimiliki anak, yang wajib dilindungi dan diperhatikan.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia : sebagai bahan acuan dan masukan dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran radio.

- b. Bagi Stasiun Radio : sebagai pedoman dan pengetahuan, agar lebih meningkatkan kualitas isi siaran dan mengedepankan serta melindungi hak-hak anak khususnya.
- c. Bagi penulis : sebagai pengetahuan dan memperkaya referensi tentang hak-hak anak.

F. Batasan Konsep

1. Hak adalah milik, kewenangan , kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah dituntukan oleh Undang-Undang atau aturan lainnya). Dapat pula diartikan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.⁶
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109) dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
3. Informasi adalah keterangan atau data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.⁸

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm.381.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Kamus Komputer dan Teknologi Informasi diakses dari www.total.or.id

4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.⁹
5. Radio adalah teknologi yang mampu melakukan pengiriman sinyal melalui modulasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas lewat udara dan maupun ruang hampa; pesawat penerima radio; siaran suara melalui udara.¹⁰
6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.¹¹

Dengan demikian berdasarkan pengertian-pengertian diatas, batasan konsep dari penulisan hukum ini adalah perlindungan hak-hak anak, khususnya untuk mendapatkan informasi yang benar melalui siaran radio, sebagai media komunikasi massa dengar yang memberikan informasi secara jujur, benar dan wajar bagi anak-anak sesuai dengan Pedoman Prilaku Penyiaran.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, tentang Penyiaran, Pasal 1 Angka 1.

¹⁰ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Tim Prima Pena, Terbitan Gitamedia Press, 2005, hlm.708.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, tentang Penyiaran, Pasal 1 Angka 3.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada ilmu hukum dogmatik atau normatif jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematisasi hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan harmonisasi hukum secara vertikal, karena merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan atas metode sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan mengadakan penelitian serta analisis terhadap fakta hukum yang ada.

2. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yang akan dipakai berupa :

1) Norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal pada Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252 tentang Penyiaran.
- d) Konvensi Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel opini para sarjana hukum dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, penulis akan mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. S.Rahmat M.Arifin, S.Si, Selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Agus Nurudin, Ketua Pengurus Daerah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) DIY.
- c. Asty Fanany, *Broadcast Service Officer Radio* dan Pengamat Radio di Yogyakarta.

4. Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis, yaitu :

- a. Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif, berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Anak dan Penyiaran, khususnya Radio.
- b. Sistematisasi isi , langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Kemudian dilakukan sistematisasi secara horizontal dan horizontal. Secara vertikal dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252 tentang Penyiaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279, Konvensi Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109) dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1874, Nomor 23). Dalam Pasal 330, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), *Convention On The Rights of The Children* Tahun 1989 , yang

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang *Nomor Pengesahan Konvensi ILO 182*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 Tentang *Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Secara vertikal terdapat anatomi, prinsip hukum yang diterapkan adalah Derogasi, sehingga dapat diterapkan asas perundang-undangan *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Secara horizontal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang setingkat dan sejajar yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252 tentang Penyiaran, Konvensi Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209), Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109) dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1874,Nomor 23).Dalam Pasal 330, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), *Convention On The Rights of The Children* Tahun 1989 , yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang *Nomor Pengesahan Konvensi ILO 182*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 Tentang *Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Dengan demikian, secara horizontal tidak terdapat antinomi atau konflik berlaku prinsip penalaran hukum Non Kontradiksi, sehingga berlaku asas perundang-undangan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

c. Analisis Hukum Positif

Secara vertical, prinsip penalaran yang digunakan adalah derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga ditemukan asas hukm *lex superiori derogate legi inferiori*. Secara horizontal tidak terdapat konflik hukum.

d. Interpretasi Hukum Positif

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari suatu sistem aturan menggantikan suatu ketentuan hukum. Interpretasi Teleologis yaitu setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis, bertitik tolak pada tujuan diundangkannya suatu norma.

e. Menilai Hukum Positif

Yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252 tentang Penyiaran. Dari hukum positif yang dipakai, diprediksi bahwa masalah perlindungan anak dan informasi yang benar melalui siaran radio belum dapat memenuhi hak dan kepentingan yang baik bagi anak.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas.

Langkah terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam hal perlindungan terhadap hak anak dan informasi yang benar melalui siaran radio, hal yang khusus yaitu kenyataan yang ada di masyarakat tentang radio sebagai media dengan penyampaian informasi yang benar, khususnya terhadap anak-anak.

H. Sistematika Isi

Bab I. Bab ini berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, keaslian penelitian dan batasan konsep. Dalam Bab I ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, bahan hukm primer dan bahan hukum sekunder, serta proses analisis bahan-bahan hukum. Kemudian dikemukakan juga tentang sistematika isi penulisan diakhir Bab I.

Bab II. Berisi tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang anak, meliputi pengertian dan batasan usia anak, hak dan kewajiban anak, tinjauan umum mengenai informasi yang benar melalui siaran radio, meliputi pengertian tentang penyiaran radio,

fungsi dan arah penyiaran, serta lembaga penyiaran. Hasil penelitian berupa hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio, dan bagaimana sangsi yang diberikan bagi radio yang tidak menjamin dan melindungi hak-hak anak dalam siarannya.

Bab III. Bab terakhir berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari Hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio. Maka, diakhir Bab III ini juga dikemukakan saran berkaitan dengan hak-hak anak atas informasi yang benar melalui siaran radio.